

Studi Komparasi Model Kepemimpinan Kepala Negara Ganda dalam Sistem Pemerintahan Diarki di Beberapa Negara

Zaenal Abidin AS & Firdaus Muhamad Iqbal*

Universitas Jenderal Achmad Yani

*Korespondensi: firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v8i1.9085

Submitted: 2025-03-26, Revised: 2025-06-11, Accepted: 2025-06-25

Abstract

A diarchy, or dual head-of-state leadership system, is a governance model in which two individuals jointly exercise the functions of the head of state. This study analyzes the impacts and challenges of the diarchy system in modern contexts by examining its implementation in several countries, including Andorra, San Marino, and Nicaragua. A qualitative methodology was employed, utilizing secondary data analysis through literature reviews, constitutional documents, and related academic sources. The findings demonstrate that the diarchy system offers improved power balance, enhances governmental legitimacy, and fosters administrative efficiency. However, the system also faces challenges, such as potential leadership conflicts, political fragmentation, and the risk of dominance by one leader, which may undermine principles of equality in governance. Furthermore, the application of diarchy in democratic and authoritarian systems yields varied outcomes, depending on the availability of checks and balances. Therefore, the success of a diarchy system hinges on legal frameworks, political traditions, and institutional capacity to maintain governmental stability.

Keywords: *diarchy, dual leadership, governance*

Abstrak

Sistem diarki, atau kepemimpinan kepala negara ganda, merupakan model pemerintahan yang mengatur dua individu untuk secara bersama-sama menjalankan fungsi kepala negara. Studi ini menganalisis dampak dan tantangan sistem diarki dalam konteks modern dengan menelaah penerapannya di beberapa negara, termasuk Andorra, San Marino, dan Nikaragua. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder, meliputi kajian literatur, dokumen konstitusi, dan sumber akademis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model sistem diarki menawarkan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik, meningkatkan legitimasi pemerintahan, serta mendorong efisiensi dalam pengelolaan negara. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti potensi konflik kepemimpinan, fragmentasi politik, serta risiko dominasi salah satu pemimpin yang dapat menghambat prinsip kesetaraan dalam pemerintahan. Selain itu, penerapan diarki dalam sistem demokratis dan otoriter menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada mekanisme checks and balances yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan sistem diarki sangat bergantung pada struktur hukum, tradisi politik, serta kapasitas institusional dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Kata kunci: *diarki, kepemimpinan ganda, pemerintahan*

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan hasil alami dari dinamika kehidupan dalam masyarakat. Konsep ini mencerminkan hubungan antara pemimpin dan individu yang dipimpin, serta menggambarkan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan dan membimbing mereka menuju tujuan yang telah ditetapkan (Garis, 2018). Dalam kajian politik, pemimpin pemerintahan diposisikan sebagai aktor, yakni individu yang memegang jabatan atau memiliki kewenangan dalam suatu lembaga formal (Haboddin & Arswendi, 2022). Jenis pemimpin bisa ditemukan dalam beragam model kepemimpinan, baik dalam pemimpin otoriter, demokratis, transformatif, korporatis, dan populis (Dhakidae, 2015). Variasi dalam gaya kepemimpinan tidak hanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang pemimpin, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter pemerintahan di berbagai wilayah dunia (Anangkota, 2017).

Pemerintahan di dunia berdasarkan jenisnya dapat dikategorikan melalui struktur kekuasaan, sistem politik, dan distribusi kewenangan. Keadaan ini memungkinkan untuk menguraikan secara garis besar dinamika bentuk negara di wilayah Timur dan Barat. Dengan demikian, jenis pemerintahan negara di Timur meliputi: none, republik, monarki (yang dapat dibagi menjadi monarki patriarkal, despotik, dan teokratis), serta kekaisaran. Sementara itu, jenis pemerintahan negara di Barat adalah: polis, republik (oligarkis dan demokratis), monarki (yang terbagi menjadi patriarkal, feodal, dan absolut), diarki, serta kekaisaran (yang dapat dibagi menjadi terpusat dan terdesentralisasi) (Liubashits dkk., 2021).

Perbedaan jenis pemerintahan di Timur dan Barat ini mencerminkan perkembangan sejarah, budaya, serta nilai-nilai politik yang dianut oleh masing-masing wilayah. Salah satu bentuk pemerintahan yang menarik untuk dikaji oleh peneliti lebih lanjut adalah diarki, yang termasuk dalam sistem pemerintahan di Barat. Bentuk pemerintahan diarki, yang unik dan berbeda dari bentuk monarki maupun republik, belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur, padahal bentuk ini tidak kalah umum dibandingkan monarki atau republik. Esensi diarki sebagai bentuk pemerintahan terletak pada pembagian prerogatif kekuasaan antara penguasa tertinggi, yang memiliki fungsi keagamaan (dan dalam beberapa kasus juga fungsi yudisial), serta "wakil raja" yang memegang kekuasaan militer dan administratif secara penuh (Liubashits dkk., 2021).

Era modern ini, belum banyak yang mengetahui mengenai sistem pemerintahan diarki padahal secara historis sistem ini telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti di India Britania antara tahun 1921 dan 1937 (Ozekhome, 2020). Saat ini, beberapa negara seperti Andorra dan San Marino masih menerapkan sistem diarki modern dalam pemerintahan mereka ditambah pada tahun 2025 Nikaragua menerakan sstem pemerintahan serupa. Diarki memiliki keunggulan dalam efisiensi pembuatan hukum karena melibatkan lebih sedikit individu dalam pengambilan keputusan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan kebebasan politik dan potensi ketidakstabilan akibat konflik antara dua penguasa. Dibandingkan dengan sistem lain, republik parlementer lebih berpihak pada kepentingan mayoritas tetapi cenderung lambat dalam proses legislatif, sementara demokrasi

presidensial memungkinkan pengambilan keputusan yang tegas tetapi berisiko mengalami kebuntuan politik (Governmentvs, 2025).

Bagian ini menyajikan tinjauan literatur yang mengulas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan riset sebelumnya, metode yang digunakan, serta temuan utama yang telah dihasilkan. Melalui analisis berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada serta kontribusi yang dapat diberikan dalam memperkaya pemahaman terhadap isu yang dibahas. Selain itu, kajian ini juga berperan dalam merumuskan kerangka teori yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dengan judul *Diarchy? The System of Co-Rulership in Byzantium at the Turn of the 13th - 14th Centuries and its Impact on the Situation in the State* oleh (Lysikov, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan di Bizantium pada saat itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, sistem pemerintahan bersama mulai diterapkan pada masa awal Dinasti Palaiologos. Kedua, adanya pembagian tugas dalam keluarga kekaisaran. Andronikos II mengurus berbagai aspek pemerintahan, seperti keuangan, ekonomi, administrasi, hukum, politik, dan kebijakan luar negeri. Sementara itu, putranya, Michael IX, lebih fokus pada kepemimpinan militer. Sistem pemerintahan diarki, di mana kekuasaan dibagi antara dua penguasa, menciptakan dinamika politik yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan dua istana kekaisaran yang terpisah, masing-masing dengan stafnya sendiri, menyebabkan perpecahan di kalangan elit Bizantium.

Penelitian kedua dengan judul *Nature and Functioning of Local Government in the British India (1680-1947)* oleh (Awan & Uzma, 2014). Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem diarki diperkenalkan melalui *Government of India Act 1919*, yang membagi pemerintahan di tingkat provinsi menjadi dua bagian. Bidang yang dikuasai pemerintah Inggris (*Reserved Subjects*) mencakup keuangan, ketertiban umum, urusan luar negeri, dan transportasi, sementara bidang yang dikelola oleh menteri India (*Transferred Subjects*) meliputi kesehatan, pendidikan, dan administrasi lokal. Meskipun sistem ini memberikan tanggung jawab kepada menteri-menteri India, mereka tetap berada di bawah pengawasan dan veto dari gubernur Inggris. Dalam praktiknya, sistem diarki tidak berjalan efektif karena pemerintah Inggris masih mempertahankan kendali atas kebijakan-kebijakan utama. Akibatnya, sistem ini sering dikritik sebagai reformasi yang setengah hati dan tidak memberikan otonomi nyata bagi pemimpin lokal India.

Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan model kepemimpinan kepala negara ganda dalam sistem diarki modern di negara-negara seperti Andorra, San Marino, dan Nikaragua. Studi ini tidak hanya meninjau bagaimana sistem diarki diterapkan dalam konteks historis, tetapi juga melihat bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam pemerintahan demokratis saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan tantangan dalam sistem diarki modern, serta membandingkan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini akan

memberikan wawasan yang lebih luas dan komparatif, yang mencakup baik aspek historis maupun analisis sistem pemerintahan di masa kini.

Metode

Metode merupakan salah satu elemen fundamental dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian, dalam hal ini, merujuk pada pendekatan yang dirancang secara sistematis dan konsisten untuk mengungkap kebenaran serta menyelesaikan masalah, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan (Iqbal, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial-politik secara mendalam, khususnya mengenai model kepemimpinan kepala negara ganda dalam sistem pemerintahan diarki. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan dinamika kekuasaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, metode kualitatif eksploratif memungkinkan peneliti untuk mengkaji kompleksitas sistem pemerintahan diarki melalui interpretasi mendalam terhadap data kontekstual dan historis yang relevan dengan karakteristik kepemimpinan ganda di masing-masing negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan lain, namun tetap signifikan dengan kajian yang dilakukan. Keunggulan data sekunder terletak pada aksesibilitasnya yang cepat dan efisien. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengacu pada berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui desain tematik, naratif, atau diskursif. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memperkuat landasan teoritis yang mendukung kajian ini (Munadi, 2023).

Langkah awal penelitian ini dimulai dengan identifikasi topik dan perumusan masalah terkait penerapan model kepemimpinan ganda dalam sistem diarki di beberapa negara. Penulis menelaah latar belakang historis, konstitusi, dan dinamika politik masing-masing negara untuk memastikan relevansi kajian. Langkah kedua mengumpulkan data dari sumber sekunder berupa konstitusi resmi seperti Andorra, San Marino, dan Nikaragua, serta didukung oleh jurnal ilmiah, buku akademik, laporan internasional, dan dokumen hukum. Sumber daring juga digunakan untuk memperbarui informasi kontekstual. Langkah ketiga, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui model tematik dan naratif yang selaras dengan pendekatan eksploratif. Langkah akhir dari metode ini adalah penarikan kesimpulan yang menjawab masalah dan mengaitkannya dengan teori kepemimpinan serta mempertimbangkan konteks politik dan kelembagaan di masing-masing negara. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas dan dinamika sistem pemerintahan diarki dalam praktik kontemporer.

Konseptualisasi dan Karakteristik Sistem Pemerintahan Diarki

Laporan *Montague-Chelmsford* tahun 1918 diadopsi oleh pemerintah Inggris melalui *Government of India Act 1919*, yang memperkenalkan sistem pemerintahan diarki. Dalam sistem ini, sebagian kewenangan pemerintah daerah dialihkan ke menteri India yang bertanggung jawab kepada badan legislatif provinsi (Awan & Uzma, 2014). Diarki merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan yang ditandai dengan kepemimpinan bersama oleh dua individu yang memerintah suatu wilayah, baik secara sah maupun *de facto* melalui kesepakatan atau penggunaan kekuatan. Para pemimpin dalam sistem ini umumnya dikenal sebagai rekan-pemimpin (*co-rulers*) (Hale & Colton, 2010).

Sistem ini memungkinkan pendelegasian sebagian kewenangan kepada dewan lokal, yang sebelumnya telah melibatkan perwakilan masyarakat pribumi India sejak diberlakukannya *Indian Councils Act 1892*. Di sisi lain, istilah *duumvirate* secara khusus merujuk pada jabatan *duumviri* dalam Republik Romawi, yang juga mengadopsi sistem kepemimpinan ganda. Selain itu, terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa, seperti biarki dan tandemokrasi yang mengacu pada sistem pemerintahan atau jabatan dengan kepemimpinan bersama. Namun, dalam konteks monarki, sistem di mana dua atau lebih individu berbagi kekuasaan untuk sementara waktu umumnya disebut sebagai koregensi (Hale & Colton, 2010).

Penerapan sistem diarki dalam *Government of India Act 1919* mencerminkan upaya pemerintah Inggris untuk memberikan otonomi terbatas kepada India dengan mendistribusikan sebagian kewenangan kepada menteri India dan dewan lokal. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pribumi dalam pemerintahan, sebagaimana yang telah dimulai sejak *Indian Councils Act 1892*. Namun, dalam praktiknya, diarki tidak sepenuhnya efektif karena kendali utama tetap berada di tangan pemerintah kolonial Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem diarki dalam konteks kolonial lebih bersifat simbolis dibandingkan sebagai mekanisme yang benar-benar memberikan kemandirian politik kepada masyarakat pribumi.

Konsep diarki sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan. Sejak zaman Romawi, sistem kepemimpinan ganda telah diterapkan dalam bentuk *duumvirate*, di mana dua pemimpin berbagi tanggung jawab pemerintahan dalam struktur administratif tertentu. Model kepemimpinan ini juga dikenal dalam berbagai istilah lain seperti biarki dan tandemokrasi, yang menyoroti aspek berbagi kekuasaan di antara dua pemimpin dalam suatu pemerintahan. Meskipun demikian, sistem ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan potensi konflik kepentingan antara dua pemimpin yang memiliki otoritas setara.

Maka dalam konteks monarki, bentuk pemerintahan bersama lebih sering ditemukan dalam sistem koregensi, di mana dua atau lebih penguasa berbagi kekuasaan untuk sementara waktu, misalnya saat seorang raja yang masih di bawah umur didampingi oleh wali. Koregensi berbeda dengan diarki dalam sistem pemerintahan modern yang lebih menekankan pada pembagian kekuasaan secara struktural dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun sistem kepemimpinan ganda memiliki berbagai bentuk dalam sejarah

politik, efektivitasnya sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan, koordinasi kebijakan, serta legitimasi politik yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin.

Pemerintahan bersama (*co-rule*) merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah. Beberapa contoh di masa lalu meliputi Dinasti Pandyan di Tamilakam, sistem dua raja di Sparta, jabatan konsul di Republik Romawi, hakim di Kartago, serta berbagai masyarakat Polinesia kuno yang menerapkan kepemimpinan ganda. Selain itu, sistem pewarisan di kerajaan Jermanik dan Dacia juga sering menghasilkan pemerintahan bersama. Hal yang serupa terjadi dalam Kekaisaran Inca, di mana gelar kaisar sering dipegang oleh dua orang sekaligus, atau melalui sistem suksesi yang memungkinkan transisi kekuasaan bersama. Saat ini, beberapa negara masih menerapkan sistem diarki. Misalnya, Andorra dipimpin oleh dua pangeran yang terdiri dari Presiden Prancis dan Uskup Urgell dari Catalonia-Spanyol. San Marino juga mengadopsi model serupa dengan kepemimpinan oleh dua Kapten Regent (Rostworowski de Diez Canseco & Duran, 2008). Selain itu, sejak amandemen konstitusi pada tahun 2025, Nikaragua dipimpin oleh dua co-presiden, menandai salah satu contoh terbaru dari sistem pemerintahan bersama di era modern.

Model pemerintahan bersama (*co-rule*) telah menjadi bagian dari struktur politik sejak zaman kuno, menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengelola negara. Sistem ini berkembang dalam berbagai bentuk, seperti monarki ganda di Sparta, konsul di Republik Romawi, hingga sistem pewarisan di kerajaan Jermanik dan Dacia. Keberadaan sistem ini di berbagai peradaban menunjukkan bahwa kepemimpinan kolektif dapat muncul sebagai solusi dalam menghadapi tantangan politik dan administratif, terutama dalam menjaga stabilitas serta memastikan kesinambungan pemerintahan melalui suksesi yang lebih terstruktur.

Di era modern, sistem diarki masih diterapkan di beberapa negara, seperti Andorra dan San Marino, yang mempertahankan model kepemimpinan ganda dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara pemimpin yang memiliki peran administratif dan simbolis. Keberadaan dua kepala negara di negara-negara ini menunjukkan bahwa diarki dapat tetap berfungsi dengan baik dalam sistem pemerintahan yang demokratis, selama ada kejelasan dalam pembagian tugas dan mekanisme pengambilan keputusan. Amandemen konstitusi Nikaragua pada tahun 2025 yang memperkenalkan sistem co-presiden menjadi salah satu contoh terbaru dari adaptasi model kepemimpinan bersama dalam konteks politik modern, yang menunjukkan bagaimana konsep *co-rule* masih memiliki relevansi dalam dinamika pemerintahan saat ini.

Sistem pemerintahan diarki memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk pemerintahan lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah kepemimpinan ganda, di mana dua pemimpin berbagi kekuasaan eksekutif secara bersamaan. Untuk memastikan kelancaran pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang jelas, di mana masing-masing pemimpin memiliki tanggung jawab yang telah ditentukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, sistem ini juga mengandalkan mekanisme penyelesaian konflik yang dirancang untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua pemimpin,

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakstabilan (Rodriguez, 2025).

Legitimasi dalam sistem diarki bersifat ganda, artinya kedua pemimpin harus memiliki dasar hukum atau pengakuan yang kuat, baik melalui konstitusi maupun tradisi politik yang berlaku. Keberadaan dua pemimpin dengan kewenangan yang terstruktur memungkinkan adanya stabilitas dan efisiensi, di mana keseimbangan kekuasaan dan mekanisme pengawasan internal dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan karakteristik ini, sistem diarki berpotensi menciptakan pemerintahan yang seimbang dan stabil, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan konsensus antara pemimpin yang berkuasa (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025).

Diarki menawarkan model kepemimpinan yang unik dengan struktur kekuasaan yang terbagi secara merata antara dua pemimpin. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengurangi potensi otoritarianisme dari satu individu. Namun, efektivitas diarki sangat bergantung pada sinergi antara kedua pemimpin, karena perbedaan kebijakan atau visi politik dapat berujung pada kebuntuan dalam pemerintahan. Selain aspek kepemimpinan ganda, legitimasi dalam sistem diarki juga memainkan peran penting dalam menentukan keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan. Dengan kedua pemimpin yang harus memiliki pengakuan hukum dan politik yang kuat, sistem ini memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya terbagi secara formal, tetapi juga diterima oleh masyarakat serta lembaga negara lainnya.

Sistem pemerintahan diarki memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya relevan dalam konteks tertentu, terutama dalam menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang. Dengan keberadaan dua kepala negara atau kepala pemerintahan yang berbagi otoritas, potensi konsentrasi kekuasaan pada satu individu menjadi sangat kecil. Hal ini membentuk mekanisme saling kontrol yang efektif antara kedua pemimpin. Pembagian kewenangan dalam diarki dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan karena adanya pengawasan timbal balik antara dua pemimpin (Rodriguez, 2025). Selain itu, diarki sering kali menghadirkan dua figur dengan latar belakang atau basis kekuasaan yang berbeda. Hal ini mencerminkan keterwakilan yang lebih luas dalam masyarakat atau antara dua institusi berbeda (seperti agama dan negara), sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2025). Keunggulan lainnya adalah kesinambungan pemerintahan, karena ketika salah satu pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya, pemimpin lainnya dapat mengambil alih peran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Konstitusi Andorra. Lebih jauh, diarki menekankan proses konsensus dan dialog dalam proses pengambilan keputusan penting, menghindari dominasi pribadi atau keputusan sepihak (Hale & Colton, 2010).

Namun, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan, potensi konflik kepemimpinan dapat muncul apabila terdapat perbedaan visi dan kepentingan antara kedua pemimpin, yang dapat mengakibatkan *deadlock* dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang

tercermin dalam sejarah Kekaisaran Bizantium (Lysikov, 2021). Selain itu, proses pengambilan kebijakan bisa berjalan lambat karena memerlukan koordinasi antar pemimpin, sebagaimana dikritisi dalam praktik diarki kolonial Inggris di India yang dianggap tidak efisien (Ozekhome, 2020). Dalam praktiknya, sistem ini juga rawan mengalami ketimpangan kekuasaan jika salah satu pihak lebih dominan, sehingga merusak prinsip dasar pembagian kekuasaan (Awan & Uzma, 2014). Kompleksitas administratif turut menjadi persoalan karena keberadaan dua pemimpin menuntut struktur birokrasi yang lebih besar, mulai dari anggaran, staf, hingga prosedur protokoler, yang berpotensi menghambat efisiensi pemerintahan (Rodriguez, 2025). Oleh karena itu, meskipun diarki memiliki nilai positif dalam hal stabilitas dan keterwakilan, efektivitasnya sangat bergantung pada harmoni kepemimpinan serta kerangka institusional yang mendukungnya.

Pada praktiknya, keberhasilan sistem ini sering kali ditentukan oleh tradisi politik suatu negara, di mana diarki dapat berfungsi secara efektif jika terdapat dasar konstitusional yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat. Sistem ini dapat menghadapi tantangan serius apabila salah satu pemimpin memiliki dominasi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Namun meskipun sistem diarki menawarkan berbagai keuntungan seperti keseimbangan kekuasaan dan keterwakilan yang lebih luas, tantangan yang dihadapi juga tidak dapat diabaikan. Potensi konflik antara dua pemimpin dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan, terutama jika terdapat perbedaan strategi atau persaingan politik. Oleh karena itu, keberhasilan model ini sangat bergantung pada desain institusional yang mampu mengatur harmoni otoritas, prosedur penyelesaian konflik, serta fardu para pemimpin dalam menjaga stabilitas dan kohesi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun diarki memiliki potensi sebagai sistem pemerintahan yang berkelanjutan, penerapannya tetap memerlukan adaptasi sesuai dengan konteks politik dan sosial masing-masing negara.

Model Kepemimpinan Kepala Negara Ganda di Andorra, San Marino, dan Nikaragua

Pada sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antara dua pemimpin merupakan fenomena yang telah diterapkan dalam berbagai negara dan periode sejarah. Model kepemimpinan kepala negara ganda, atau yang dikenal sebagai sistem diarki, merupakan salah satu bentuk pemerintahan di mana dua individu berbagi tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Model ini dapat ditemukan di beberapa negara modern, seperti Andorra, San Marino, dan Nikaragua yang masing-masing memiliki struktur kepemimpinan ganda dengan karakteristik unik. Keberadaan model kepemimpinan ganda ini menunjukkan bahwa sistem diarki masih memiliki relevansi dalam pemerintahan modern, meskipun efektivitasnya bergantung pada mekanisme koordinasi, pembagian kekuasaan, serta kemampuan para pemimpin dalam menjaga stabilitas politik.

Pertama, Andorra yang terletak di antara Prancis dan Spanyol di Pegunungan Pyrenees adalah negara terkecil keenam di Eropa. Menariknya, Andorra adalah negara di dunia yang masih menerapkan sistem pemerintahan diarki di mana kekuasaan administratif dibagi antara dua pemimpin, yaitu Presiden Prancis dan Uskup Urgell dari Catalonia Spanyol. Secara historis, Andorra dibentuk oleh Charlemagne sebagai salah satu dari

serangkaian negara penyangga untuk mencegah invasi bangsa Moor ke wilayah Kristen di Prancis (Wright, 2020). Sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 4 (*Andorra's Constitution, 1993*) dengan jelas mengatur peran dan kewenangan *Co-Prince*, yaitu Uskup Urgell (Spanyol) dan Presiden Prancis, yang bertindak sebagai kepala negara bersama dalam sistem diarki parlementer. Konstitusi membedakan kewenangan yang dapat mereka jalankan sendiri dan yang memerlukan persetujuan dari Kepala Pemerintahan Andorra atau Dewan Umum Andorra (parlemen) (Constitute Project, 2022).

Berikutnya pada Pasal 45 (*Andorra's Constitution, 1993*) terdapat beberapa kewenangan yang hanya dapat dijalankan oleh *Co-Prince* bersama dengan Kepala Pemerintahan. Dalam konteks ini, mereka memiliki peran dalam menetapkan pemilu atau referendum sesuai dengan ketentuan konstitusi, mengangkat Kepala Pemerintahan, serta membubarkan Dewan Umum (parlemen) sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah berlalu lebih dari satu tahun sejak pemilu terakhir. Mereka juga memiliki tanggung jawab dalam menerima dan mengakreditasi duta besar dari dan ke Andorra, mengangkat pejabat pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi, mengesahkan dan menetapkan undang-undang, serta memberikan persetujuan resmi terhadap perjanjian internasional setelah melalui proses ratifikasi di parlemen.

Kemudian berdasarkan Pasal 46 (*Andorra's Constitution, 1993*), *Co-Prince* memiliki sejumlah wewenang yang dapat mereka jalankan secara mandiri maupun bersama dengan Kepala Pemerintahan. Secara independen, mereka berhak memberikan pengampunan (*prerogative of grace*), mengangkat satu anggota di Dewan Kehakiman Tertinggi dan Mahkamah Konstitusi, serta membentuk layanan administratif yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas konstitusional mereka. Selain itu, mereka memiliki kewenangan untuk meminta peninjauan awal terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang atau perjanjian internasional sebelum disahkan, menyetujui rancangan perjanjian internasional sebelum diajukan ke parlemen, serta mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan kewenangan mereka.

Pasal 47 (*Andorra's Constitution, 1993*) menyebutkan bahwa setiap *Co-Prince* menerima anggaran tahunan dari Dewan Umum Andorra, yang dapat mereka gunakan sesuai kebijakan masing-masing. Selain itu pada Pasal 48 masing-masing *Co-Prince* menunjuk perwakilan pribadi di Andorra untuk membantu menjalankan tugas-tugas administratif mereka. Jika salah satu *Co-Prince* berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya, konstitusi mengatur bahwa *Co-Prince* lainnya dapat mengambil alih peran tersebut, dengan persetujuan Kepala Pemerintahan Andorra atau Dewan Umum.

Beberapa perjanjian internasional mengharuskan *Co-Prince* (atau perwakilan yang mereka tunjuk) untuk ikut serta dalam proses negosiasi serta persetujuan akhir sebelum perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 66 dan 67 (*Andorra's Constitution, 1993*). Selain itu, *Co-Prince* juga memiliki hak untuk mengusulkan amandemen konstitusi, sebagaimana hak yang juga dimiliki oleh Dewan Umum. Namun, mereka tidak memiliki hak veto atas undang-undang yang telah disahkan

oleh Dewan Umum, meskipun mereka tetap memiliki hak veto terhadap beberapa perjanjian internasional tertentu.

Menelaah model kepemimpinan di Andorra dalam sistem diarki mencerminkan kombinasi antara otoritas tradisional dan mekanisme demokratis modern. Dengan Presiden Prancis dan Uskup Urgell bertindak sebagai *Co-Prince*, sistem ini menunjukkan karakteristik kepemimpinan kolektif, di mana kepala negara berbagi kekuasaan berdasarkan konstitusi yang mengatur batasan dan mekanisme pengambilan keputusan. Dari perspektif teori kepemimpinan, model ini lebih dekat dengan kepemimpinan korporatis dan transformatif. Elemen kepemimpinan korporatis tampak dalam pembagian kekuasaan yang jelas, di mana *Co-Prince* berfungsi sebagai figur simbolis yang memfasilitasi stabilitas politik melalui peran konstitusional mereka, sementara otoritas eksekutif utama tetap berada di tangan Kepala Pemerintahan dan Dewan Umum Andorra. Sebaliknya, aspek kepemimpinan transformatif terlihat dalam peran *Co-Prince* dalam mengusulkan amandemen konstitusi serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional, yang menunjukkan bahwa meskipun peran mereka bersifat seremonial, mereka tetap memiliki pengaruh dalam membentuk arah kebijakan negara.

Mekanisme pembagian wewenang antara *Co-Prince*, Kepala Pemerintahan, dan Dewan Umum juga mencerminkan keseimbangan antara kepemimpinan demokratis dan otoriter terbatas. Sementara *Co-Prince* memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan memberikan pengampunan, mereka tidak memiliki hak veto atas keputusan legislatif, sehingga menjaga prinsip akuntabilitas demokratis dalam pemerintahan. Namun, hak mereka dalam menyetujui perjanjian internasional tertentu mengindikasikan adanya unsur kepemimpinan elit yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara.

Selain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas dalam menjalankan pemerintahan. Ketika salah satu *Co-Prince* tidak dapat menjalankan tugasnya, peran tersebut dapat dialihkan kepada *Co-Prince* lainnya dengan persetujuan dari Kepala Pemerintahan atau Dewan Umum, yang mencerminkan prinsip kontinuitas kepemimpinan dalam pemerintahan diarki Andorra. Dengan demikian, model kepemimpinan ini menggabungkan unsur stabilitas, simbolisme tradisional, dan mekanisme demokratis, yang memungkinkan pemerintahan diarki di Andorra tetap efektif dalam konteks politik modern.

Negara kedua yang menerapkan sistem diarki yaitu San Marino, mengingat letak geografis San Marino yang sepenuhnya dikelilingi oleh Italia atau wilayah *enclave*. Republik San Marino, yang mengklaim sebagai republik tertua di dunia, menurut legenda didirikan oleh seorang pemahat batu Kristen bernama Marinus dari Dalmatia (kemudian dikanonisasi sebagai Santo Marinus - San Marino dalam bahasa Italia) dan merdeka secara tradisional pada tanggal 3 September tahun 301 dari Kerajaan Roman. Meskipun secara fisik San Marino terisolasi, faktor politik dan diplomatik memungkinkan negara ini melampaui keterbatasan geografisnya (Zonzini, 2022). Di San Marino, cabang eksekutif negara dikenal sebagai Kongres Negara (*Congresso di Stato*), sedangkan cabang legislatif disebut Dewan Besar dan Umum (*Consiglio Grande e Generale*) (Butler, 2024).

Pada tahun 1244, sistem kepemimpinan *duumvirat* dengan dua Kapten Regent (*Capitani Reggenti*) didirikan, yang masih bertahan hingga saat ini. Setelah Andorra, San Marino adalah negara di dunia yang memiliki dua kepala negara yang menjabat hanya selama setengah tahun atau setiap enam bulan khususnya per 1 April dan 1 Oktober, Kapten Regent memiliki masa jabatan terpendek dibandingkan kepala negara mana pun di dunia. Menggunakan mekanisme demokrasi langsung yang tidak ditemukan di tempat lain, salah satunya adalah *Istanze d'Arengo* di San Marino, yaitu kesempatan bagi warga untuk mengajukan petisi dan permintaan kepentingan publik kepada Kapten Regent yang baru terpilih. Berbeda dengan negara kecil di kawasan lain yang umumnya mengadopsi sistem politik dari negara penjajah setelah dekolonisasi, institusi politik negara mikro San Marino lebih banyak terbentuk melalui proses internal. Hal ini juga menyebabkan secara historis lebih bersifat nasionalis daripada kosmopolitan (Veenendaal, 2020).

Peran dan tanggung jawab Kapten Regent diatur dalam Konstitusi San Marino, yang telah berlaku sejak tahun 1600 dan tetap digunakan hingga saat ini, menjadikannya sebagai konstitusi tertua di dunia. Namun, konstitusi ini tidak bersifat terkodifikasi, sehingga tidak semua ketentuannya memiliki status sebagai undang-undang. Konstitusi San Marino, yang dikenal dengan nama *Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini*, disusun dalam bahasa Latin dan terdiri dari enam buku. Amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002, ketika Deklarasi Hak Warga Negara yang pertama kali disahkan pada tahun 1974 diperbarui. (Slomp, 2011).

Sebagaimana pada Buku 1 terdapat 62 Rubrica (Pasal), yang secara khusus menjelaskan tentang kekuasaan Kapten Regent dan lebih detail nya terdapat pada *Rubrica XIII (Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini, 1600)* menyebutkan bahwa :

“ Kapten Regent yang terpilih dengan cara yang telah ditentukan ini harus mulai menjabat pada hari pertama bulan April dan Oktober, setelah terlebih dahulu mendengarkan misa seperti yang telah dijelaskan. Mereka tidak boleh diperpanjang masa jabatannya lebih dari enam bulan, dan begitu masa jabatan mereka berakhir, yurisdiksi mereka pun secara otomatis dianggap selesai.

Kapten Regent memiliki yurisdiksi, wewenang, dan hak untuk menangani, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara perdata maupun pidana, baik yang sederhana maupun kompleks, serta perselisihan yang terjadi antara penduduk dan warga wilayah San Marino dan yurisdiksinya. Mereka juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan reformasi Komune San Marino, baik yang saat ini berlaku maupun yang akan dibuat di masa depan. Jika tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur suatu kasus, mereka harus mengacu pada hukum umum dan kebiasaan yang berlaku di wilayah San Marino.

Kapten Regent juga memiliki kewenangan penuh dan campuran serta hak untuk menggunakan kekuatan hukum (*potestà della spada*), untuk memutuskan, menjatuhkan hukuman, dan membebaskan dalam setiap kejahatan, pelanggaran, dan kejahatan lainnya yang dilakukan terhadap penduduk San Marino dan wilayahnya, termasuk pelanggaran terhadap properti mereka. Mereka juga dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan reformasi, atau jika tidak ada ketentuan yang relevan, mereka dapat menyesuaikan hukuman berdasarkan kasus serupa yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak ada preseden

yang dapat digunakan, mereka dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum umum atau menurut kebijaksanaan mereka sendiri, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hukuman berdasarkan kebijakan penguasa.

Semua kewenangan ini dapat dilakukan oleh kedua Kapten Regent bersama-sama atau secara individu. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia selama masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena penyakit berat atau alasan lain, maka seorang anggota Dewan akan ditunjuk sebagai pengganti berdasarkan prosedur yang sama seperti pemilihan Kapten Regent, dan aturan yang berlaku untuk dua Kapten akan diterapkan pada satu Kapten yang tersisa.

Kapten Regent yang telah terpilih tidak boleh meninggalkan San Marino atau melayani penguasa lain selama masa jabatannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengizinkan mereka untuk meninggalkan wilayah San Marino selama tidak lebih dari delapan hingga lima belas hari. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai hukuman berupa aib seumur hidup serta denda seratus lira bagi siapa pun yang melanggar, mencoba melanggar, atau mengusulkan pelanggaran aturan ini.

Kapten Regent juga memiliki kewenangan untuk mengenakan denda dan hukuman demi kepentingan ketertiban dan kewibawaan jabatan mereka, bahkan tanpa prosedur hukum formal, dengan jumlah maksimum hingga tiga ratus scudi, dengan mempertimbangkan situasi, tempat, dan individu yang terlibat.

Setiap Kapten Regent akan menerima gaji bulanan dari Komune selama masa jabatannya dan akan dibebaskan dari semua kewajiban pajak pribadi. Selama masa jabatannya, mereka akan didahulukan dalam segala hal, baik dalam pertemuan resmi maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagai simbol kedaulatan Republik San Marino. "

Menjabarkan Sistem kepemimpinan diarki yang diterapkan di San Marino melalui lembaga Kapten Regent mencerminkan prinsip demokrasi yang unik serta kesinambungan historis dalam pemerintahan republik. Dengan masa jabatan yang sangat singkat, yakni enam bulan, Kapten Regent berperan sebagai kepala negara dengan kewenangan eksekutif dan yudikatif yang luas, sebagaimana diatur dalam Konstitusi San Marino yang telah bertahan sejak tahun 1600. Dengan sistem rotasi kepemimpinan yang berlangsung setiap enam bulan, San Marino memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat mendominasi kekuasaan dalam jangka panjang. Selain itu, mekanisme *Istanze d'Arengo*, yang memberikan warga kesempatan untuk mengajukan petisi langsung kepada pemimpin yang baru terpilih, memperkuat aspek demokrasi partisipatif dalam pemerintahan negara ini. Karakteristik ini mencerminkan prinsip *checks and balances* yang efektif, di mana kekuasaan eksekutif dan yudikatif Kapten Regent tetap diawasi oleh sistem politik yang lebih luas, termasuk Dewan Besar dan Umum sebagai badan legislatif utama.

Di sisi lain, meskipun bersifat demokratis, model kepemimpinan San Marino juga memiliki unsur korporatis, terutama dalam cara negara mengatur sistem politik dan hukum secara internal tanpa banyak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Struktur pemerintahan yang telah berkembang sejak abad ke-13 lebih mengutamakan stabilitas dan kesinambungan institusional dibandingkan perubahan radikal. Kepemimpinan kolektif yang diwakili oleh dua Kapten Regent memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis konsensus, yang mencerminkan prinsip-prinsip korporatisme, di mana negara berperan sebagai

mediator dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, status San Marino sebagai negara mikro yang mempertahankan tradisi politiknya secara mandiri menunjukkan bagaimana sistem ini berorientasi pada stabilitas dan keseimbangan internal daripada ekspansi atau perubahan struktural yang drastis.

Namun, dengan adanya kewenangan yang cukup luas dalam aspek yudikatif dan eksekutif, sistem kepemimpinan San Marino juga memiliki potensi untuk menunjukkan karakteristik transformatif, terutama dalam perannya dalam menegakkan hukum dan kebijakan publik. Kapten Regent memiliki wewenang penuh untuk menangani kasus-kasus hukum, menjatuhkan hukuman, serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan pertimbangan situasional. Fleksibilitas dalam penerapan hukum ini memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi dalam pemerintahan, yang dapat memungkinkan negara untuk merespons tantangan baru tanpa terikat pada prosedur birokratis yang kaku. Oleh karena itu, meskipun San Marino lebih banyak mencerminkan model kepemimpinan demokratis dan korporatis, terdapat pula unsur kepemimpinan transformatif dalam sistem diarki ini, yang memungkinkan pemimpin untuk secara aktif menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakatnya.

Negara ketiga yaitu Nikaragua yang terletak di antara pantai Karibia dan Palung Amerika Tengah di sisi Pasifik Tanah Genting Amerika Tengah. Secara spesifik Nikaragua berbatasan dengan Honduras di utara, Laut Karibia di timur, Kosta Rika di selatan, serta Samudra Pasifik di barat, dan memiliki perbatasan maritim dengan El Salvador di barat serta Kolombia di timur. Faktanya, Nikaragua adalah negara termiskin di Amerika Tengah yang mengalami kontraksi ekonomi yang drastis dari tahun 2018 hingga 2020 akibat tantangan sosial-politik (Dutton dkk., 2024).

Kepala negara Nikaragua disebut sebagai *Jefe de Estado* (Kepala Negara), dan dari tahun 1839 hingga 1854 sebagai *Supremo Director* (Direktur Tertinggi). Pada tahun 2025, Konstitusi Nikaragua diamendemen sehingga kekuasaan kepresidenan dijalankan oleh dua co-presiden (Presiden bersama Nikaragua), bukan satu pemegang jabatan tunggal. Seorang pria dan seorang wanita dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan enam tahun. Saat amendemen ini disahkan, presiden petahana Daniel Ortega dan istrinya yang juga menjabat sebagai wakil presiden, Rosario Murillo, dinyatakan sebagai co-presiden pertama. Ortega sebelumnya telah menjabat sebagai presiden sejak tahun 2007 (Al Jazeera and news agencies, 2025).

Sebelum menerapkan sistem pemerintahan diarki, Nikaragua adalah sebuah republik presidensial, di mana Kepresidenan Nikaragua berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta menerapkan sistem multi-partai. Namun dengan berubahnya kebijakan pemerintahan, barulah menerapkan sistem republik sosialis presidensial diarkis unitaris. Sejak Daniel Ortega kembali menjabat sebagai presiden pada tahun 2007, Nikaragua mengalami kemunduran demokrasi, di mana Ortega semakin memusatkan kekuasaan dan menekan oposisi politik. Para akademisi menggambarkan Nikaragua berada di antara rezim otoritarian kompetitif dan rezim otoritarian penuh (Thaler & Mosinger, 2022).

Model kepemimpinan yang paling relevan untuk menggambarkan pemerintahan Nikaragua di bawah Daniel Ortega adalah kepemimpinan otoriter. Sejak kembalinya Ortega ke tampuk kekuasaan pada tahun 2007, ia secara bertahap memusatkan kendali pemerintahan dengan melemahkan institusi demokratis dan menekan oposisi politik. Transformasi sistem politik dari republik presidensial menjadi republik sosialis presidensial diarkis unitaris menunjukkan langkah lebih lanjut menuju konsolidasi kekuasaan, terutama dengan amendemen konstitusi yang mengukuhkan Ortega dan istrinya sebagai co-presiden pertama. Mekanisme ini secara efektif mengamankan kendali dinasti keluarga atas pemerintahan, sebuah ciri khas rezim otoriter yang mengutamakan stabilitas politik melalui sentralisasi kekuasaan.

Selain itu, implementasi sistem diarki dalam konteks Nikaragua tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya, melainkan lebih mendekati model kepemimpinan korporatis yang berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam hal ini, Ortega dan Murillo membentuk suatu sistem di mana struktur pemerintahan melayani kepentingan keluarga dan loyalis politik mereka, bukan representasi sejati dari partisipasi politik rakyat. Keputusan-keputusan politik cenderung didasarkan pada kesinambungan kekuasaan daripada pada mekanisme check and balance yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi yang sehat.

Namun, kepemimpinan Ortega juga menunjukkan unsur populisme, terutama dalam cara pemerintahannya mempertahankan dukungan publik melalui kebijakan sosial dan retorika anti-imperialis. Dengan memanfaatkan propaganda politik dan bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu, rezim Ortega berusaha mempertahankan legitimasi meskipun mengalami kemunduran demokrasi. Strategi ini sejalan dengan karakteristik kepemimpinan populis, di mana pemimpin mengklaim dirinya sebagai representasi utama rakyat, sembari mengeliminasi lawan politik melalui represi dan kontrol ketat terhadap media. Dengan demikian, sistem pemerintahan Nikaragua saat ini merupakan perpaduan antara otoritarianisme, korporatisme, dan populisme yang bertujuan mempertahankan dominasi kekuasaan tanpa mekanisme demokrasi yang efektif.

Dampak dan Tantangan Sistem Kepemimpinan Kepala Negara Ganda dalam Sistem Diarki Modern

Sistem diarki, atau kepemimpinan kepala negara ganda, merupakan model pemerintahan di mana dua individu secara bersama-sama menjalankan fungsi kepala negara. Dalam konteks modern, sistem ini dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama dalam aspek stabilitas politik dan representasi yang lebih luas. Salah satu keunggulan utama sistem ini adalah kemampuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara dua pemimpin, sehingga mengurangi risiko dominasi absolut oleh satu pihak. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih kolektif dan moderat. Selain itu, dalam sistem diarki, adanya dua kepala negara dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan karena tanggung jawab

kepemimpinan dapat dibagi berdasarkan kompetensi masing-masing pemimpin (Veenendaal, 2020).

Namun, penerapan sistem diarki dalam sistem politik modern juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya konflik kepemimpinan akibat perbedaan visi, kebijakan, atau kepentingan pribadi antara dua kepala negara. Ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan dapat memperlambat proses pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian politik. Selain itu, sistem ini berisiko menciptakan ketimpangan kekuasaan apabila salah satu pemimpin memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pasangannya, sehingga menghambat prinsip kesetaraan dalam pemerintahan. Dalam beberapa kasus, sistem diarki juga dapat memicu fragmentasi politik yang mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemimpin (Thaler & Mosinger, 2022)

Selain konflik internal, tantangan lain dalam sistem diarki adalah bagaimana sistem ini dapat beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Dalam negara dengan sistem pemerintahan demokratis, sistem diarki harus tetap mempertahankan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, dalam rezim yang lebih otoriter, diarki dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol atas negara dengan membatasi ruang bagi oposisi politik. Oleh karena itu, keberhasilan sistem kepemimpinan kepala negara ganda sangat bergantung pada struktur hukum, mekanisme *checks and balances*, serta budaya politik yang berlaku dalam suatu negara. Tanpa fondasi yang kuat, sistem ini dapat menjadi sumber instabilitas daripada solusi untuk pemerintahan yang efektif dan inklusif (Butler, 2024).

Maka dapat ditelaah bahwa sistem diarki dalam pemerintahan modern menawarkan potensi stabilitas politik dengan membagi tanggung jawab kepemimpinan di antara dua individu, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan moderat serta mengurangi risiko konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pemimpin. Selain itu, pembagian peran berdasarkan kompetensi masing-masing pemimpin dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara pemimpin serta efektivitas mekanisme hukum yang mengatur pembagian wewenang mereka. Meskipun memiliki keunggulan, sistem diarki juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi dan kohesi kepemimpinan, di mana ketidaksepakatan antara dua pemimpin dapat menghambat efektivitas pemerintahan, menciptakan kebuntuan politik, dan memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi krisis.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan diarki, yang ditandai dengan kepemimpinan ganda dua kepala negara, menawarkan keunikan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik. Studi komparasi pada negara Andorra, San Marino, dan Nikaragua menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada konteks historis, desain institusional, serta kultur politik masing-masing negara. Andorra dan San Marino, berhasil memadukan

tradisi dengan mekanisme demokratis modern melalui pembagian tugas yang jelas dan rotasi kepemimpinan, sehingga mengurangi risiko dominasi satu pihak. Di sisi lain, Nikaragua mengadopsi sistem diarki dalam kerangka otoritarian, di mana pembagian kekuasaan lebih bersifat simbolis untuk mengukuhkan kekuasaan dinasti politik. Sistem diarki juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan potensi konflik antar pemimpin. Ketidaksepakatan visi atau kepentingan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan memicu ketidakstabilan. Selain itu, sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan jika diterapkan dalam rezim otoriter.

Referensi

- Al Jazeera and news agencies. (2025, Januari 30). Nicaragua approves constitutional reforms giving president expansive powers. *Al Jazeera*.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/30/nicaragua-approves-constitutional-reforms-giving-president-expansive-powers>
- Anangkota, M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). *CosmoGov*, 3(2), 148. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14725>
- Andorra's Constitution. (1993). *Andorra's Constitution of 1993*.
 constituteproject.org
- Awan, S. M., & Uzma, N. (2014). Nature and functioning of local government in the British India (1680-1947). *Pakistan Annual Research Journal*, 50(1), 63-87.
- Butler, G. (2024). *The Legal Relations of the European Union with the Republic of San Marino*. 29(3), 247-274. <https://doi.org/10.54648/eerr2024012>
- Constitute Project. (2022, April 27). *Andorra's Constitution of 1993*.
 constituteproject.org
- Dhakidae, D. (2015). *Menerjang badai kekuasaan: Meneropong tokoh-tokoh dari sang demonstran, Soe Hok Gie, sampai putra Sang Fajar, Bung Karno*. Penerbit Buku Kompas.
- Dutton, J., Parikh, N., Cabrera, M., Robleto, C., Lambert, M., Jones, E., Treminio, S., Barkhordarzadeh, D., Auslander, A., & Ayala, R. (2024). Perceptions of surgery in Nicaragua: A cross-sectional survey study within the surgery for the people project. *PLOS Global Public Health*, 4(10), e0003835.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003835>
- Garis, R. R. (2018). Kepemimpinan Pemerintahan Pada Era Globalisasi (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1077>
- Governmentvs. (2025). Diarchy vs Consociational Democracy Characteristics. *Governmentvs*.
<https://www.governmentvs.com/en/diarchy-vs-consociational-democracy-characteristics/comparison-91-68-3?>
- Haboddin, M., & Arswendi, R. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan*. UB Press.
- Hale, H. E., & Colton, T. J. (2010). Russians and the Putin-Medvedev "Tandemocracy": A Survey-Based Portrait of the 2007-2008 Election Season. *Problems of Post-Communism*, 57(2), 3-20. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216570201>

- Iqbal, F. M. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 113–129. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541>
- Liubashits, V. Ya., Razuvaev, N. V., Mamychev, A. Yu., Trofymenko, V. A., & Danilyan, V. O. (2021). Forms Of Traditional States And Their Historical Specificity. *Revista Humanidades & Inovação*, 8(31), 113–122.
- Lysikov, P. (2021). Diarchy? The System of Co-Rulership in Byzantium at the Turn of the 13th – 14th Centuries and Its Impact on the Situation in the State. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 4. Istorija. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnoshenija*, 6, 180–200. <https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.6.14>
- Munadi, M. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Ozekhome, M. (2020, November 1). Democracy And Diarchy Or Duumvirate: Strange Bed Fellows (Part 7). *Law & Society Magazine*. <https://lawandsocietymagazine.com/democracy-and-diarchy-or-duumvirate-strange-bed-fellows-part-7/>
- Rodriguez, V. (2025, Maret 15). Andorra. *Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Andorra>
- Rostworowski de Diez Canseco, M., & Duran, S. (2008). *Le grand Inca: Pachacútec Inca Yupanqui*. Tallandier.
- Slomp, H. (2011). *Europe, a political profile: An American companion to European politics*. ABC-CLIO.
- Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini. (1600, Oktober 8).
- Thaler, K. M., & Mosinger, E. (2022). Nicaragua: Doubling Down on Dictatorship. *Journal of Democracy*, 33(2), 133–146. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0023>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025, Februari 3). San Marino. *Britannica*. <https://www.britannica.com/place/San-Marino-republic-Europe>
- Veenendaal, W. P. (2020). Politics of the four European microstates: Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino. Dalam G. Baldacchino & A. Wivel (Ed.), *Handbook on the Politics of Small States*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788112932.00017>
- Wright, N. E. (2020). Small states and international relations pedagogy: Exploring the creative agency frontier. *OASIS*, 32, 49–62. <https://doi.org/10.18601/16577558.n32.05>
- Zonzini, L. (2022). The “special situation” of the external relations of the Republic of San Marino in recent times. *Vestnik of Saint Petersburg University. International relations*, 15(3), 262–274. <https://doi.org/10.21638/spbu06.2022.303>